

DAFTAR ISI

A.	<u>LATAR BELAKANG</u>	<u>23</u>
B.	<u>TUJUAN</u>	<u>23</u>
C.	<u>RUANG LINGKUP KEGIATAN</u>	<u>24</u>
D.	<u>UNSUR YANG TERLIBAT</u>	<u>24</u>
E.	<u>REFERENSI</u>	<u>24</u>
F.	<u>PENGERTIAN DAN KONSEP</u>	<u>25</u>
G.	<u>URAIAN PROSEDUR KERJA</u>	<u>27</u>
LAMPIRAN 1	: ALUR PROSEDUR KERJA PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL SMA	29
LAMPIRAN 2	: RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL	30
LAMPIRAN 3	: INSTRUKSI KERJA ANALISIS POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH	31
LAMPIRAN 4	: CONTOH FORMAT ANALISIS POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH	32
LAMPIRAN 5	: CONTOH ANALISIS POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH	33
LAMPIRAN 6	: INSTRUKSI KERJA ANALISIS DAYA DUKUNG SATUAN PENDIDIKAN (INTERNAL)	34
LAMPIRAN 7	: CONTOH FORMAT ANALISIS DAYA DUKUNG SATUAN PENDIDIKAN (INTERNAL)	35
LAMPIRAN 8	: CONTOH HASIL ANALISIS DAYA DUKUNG SATUAN PENDIDIKAN (INTERNAL)	36
LAMPIRAN 9	: INSTRUKSI KERJA ANALISIS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (EKSTERNAL)	37
LAMPIRAN 10	: CONTOH FORMAT ANALISIS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (EKSTERNAL)	38
LAMPIRAN 11	: CONTOH HASIL ANALISIS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (EKSTERNAL)	39
LAMPIRAN 12	: CONTOH PENENTUAN MUATAN LOKAL YANG AKAN DILAKSANAKAN DI SEKOLAH	40
LAMPIRAN 13	: INSTRUKSI KERJA PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, STANDAR KOMPETENSI, DAN KOMPETENSI DASAR MUATAN LOKAL.	41
LAMPIRAN 14	: CONTOH STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MUATAN LOKAL	42
LAMPIRAN 15	: CONTOH STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR MUATAN LOKAL	43

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan nasional yang berkaitan dengan dimasukkannya muatan lokal dalam Standar Isi dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai daerah yang beragam kondisi geografis, sumber daya alam, dan masyarakatnya (sumber daya manusianya) dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda-beda.

Menyikapi kondisi tersebut, satuan pendidikan perlu memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik tentang kekhasan yang ada di lingkungannya melalui pembelajaran muatan lokal. Satuan pendidikan menentukan jenis muatan lokal yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Standar Isi yang disusun secara terpusat tidak mungkin dapat mengakomodasi beranekaragam jenis muatan lokal yang dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus menyusun dan mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP), serta perangkat penilaian, dan menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk muatan lokal yang dilaksanakan.

Dari berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (diklat/bimtek) KTSP serta evaluasi keterlaksanaan KTSP yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA ditemukan bahwa pelaksanaan mulok di sekolah pada umumnya belum terlaksana secara optimal antara lain karena adanya kendala sebagai berikut:

1. Sekolah belum memahami proses pengembangan muatan lokal;
2. Jenis muatan lokal untuk SMA di satu provinsi sama karena ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (misalnya bahasa daerah);
3. Panduan/bahan bimtek KTSP tentang pengembangan muatan lokal belum dilengkapi dengan langkah, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan:
 - a. Analisis potensi internal dan eksternal (terkait dengan daya dukung dan keunggulan lokal);
 - b. Penetapan jenis muatan lokal sesuai dengan hasil analisis potensi internal dan eksternal;
 - c. Penyiapan perangkat pendukung seperti SK dan KD, silabus, RPP, Bahan Ajar, dan panduan pelaksanaan.
4. Guru muatan lokal mengalami kesulitan dalam mengembangkan SKL, SK, dan KD, karena pada umumnya jenis muatan lokal yang diampu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Sehubungan dengan temuan di atas, sebagai salah satu upaya untuk membantu sekolah dalam mengembangkan muatan lokal, Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan "Petunjuk Teknis Pengembangan Muatan Lokal SMA".

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan memberikan acuan bagi:

1. Satuan pendidikan dalam melakukan analisis potensi internal dan eksternal;
2. Satuan pendidikan tentang mekanisme dan prosedur penentuan muatan lokal;

3. Satuan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui muatan lokal;
4. Guru muatan lokal untuk mengembangkan SKL, SK, dan KD muatan lokal.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup petunjuk teknis pengembangan muatan lokal ini mencakup kegiatan:

1. Penugasan pada TPK sekolah untuk pengembangan muatan lokal;
2. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pengembangan muatan lokal;
3. Penyusunan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
4. Pengumpulan data dan analisis pengembangan muatan lokal;
5. Penentuan jenis muatan lokal;
6. Penugasan pada guru yang akan mengajarkan muatan lokal;
7. MoU dengan pihak terkait untuk pengembangan muatan lokal;
8. Pengembangan SKL, SK, dan KD muatan lokal;
9. Pembahasan SKL, SK, dan KD muatan lokal;
10. Finalisasi dokumen muatan lokal;
11. Pengesahan muatan lokal oleh kepala sekolah;
12. Penggandaan dan pendistribusian dokumen muatan lokal.

D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala SMA,
2. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah,
3. Guru muatan lokal,
4. Komite sekolah, dan
5. Pihak terkait, seperti Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan nonformal, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha/Dunia Kerja, Dinas terkait, dsb.

E. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 17, Bab X Pasal 37 ayat 1;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat 1 butir f;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab III Pasal 14 ayat 1;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian wewenang antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran Bagian A 3;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah setempat yang berkaitan dengan pendidikan;
13. Panduan Penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh BSNP Tahun 2006;
14. Pedoman membangun hubungan sinergis dengan masyarakat. Seri School Reform 03. Direktorat Pendidikan Menengah Umum Edisi Tahun 2002.

F. Pengertian dan Konsep

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 13);
2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab X Pasal 36 ayat 2);
3. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, Lampiran Standar Isi Bab II Bagian A butir 2 d);
4. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi, Lampiran Bab II Bagian A butir 2 g);
5. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi, Lampiran Bab II Bagian A butir 3 f);
6. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan (Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Standar isi Bab II Bagian A butir 3 g);
7. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar isi Lampiran Bab II Bagian A butir 2 b);
8. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan Agama,
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan,
 - c. Bahasa,
 - d. Matematika,
 - e. Ilmu Pengetahuan Alam,
 - f. Ilmu Pengetahuan Sosial,
 - g. Seni dan Budaya,
 - h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga,
 - i. Keterampilan/Kejuruan, dan
 - j. **Muatan Lokal** (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab X Pasal 37 ayat 1).
9. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi, Lampiran Bab II Bagian B 3 butir a 1);
 10. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi, Lampiran Bab II Bagian B);
 11. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota (UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 butir 29);
 12. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 butir 24);
 13. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 56 ayat 2);
 14. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 butir 25);
 15. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 56 ayat 3);
 16. Sekolah perlu aktif mengajak kalangan alumni, industri, pemerhati pendidikan, bahkan masyarakat secara luas untuk bekerjasama dalam memikirkan pengembangan sekolah (Pedoman membangun hubungan sinergis dengan masyarakat, 2002);
 17. Pola hubungan antara sekolah dengan masyarakat harus saling menghargai, dalam posisi setara (tidak dalam bentuk “atasan-bawahan” atau “antara yang diperintah dengan yang memberi perintah”), dan harus saling memberi manfaat (*win-win solution*) - (Pedoman membangun hubungan sinergis dengan masyarakat, 2002);
 18. Membangun hubungan sinergis dengan masyarakat dapat dilakukan dengan memperkenalkan sekolah kepada masyarakat melalui cara-cara antara lain (a) melaksanakan program-program kemasyarakatan, (b) mengadakan *open house*, (c) membuat bulet in atau majalah sekolah secara teratur, (d) mengundang tokoh sebagai pembicara atau pembina pr.ogram sekoalh, (e) membuat program kerjasama

antara sekolah dengan masyarakat Pedoman membangun hubungan sinergis dengan masyarakat, 2002);

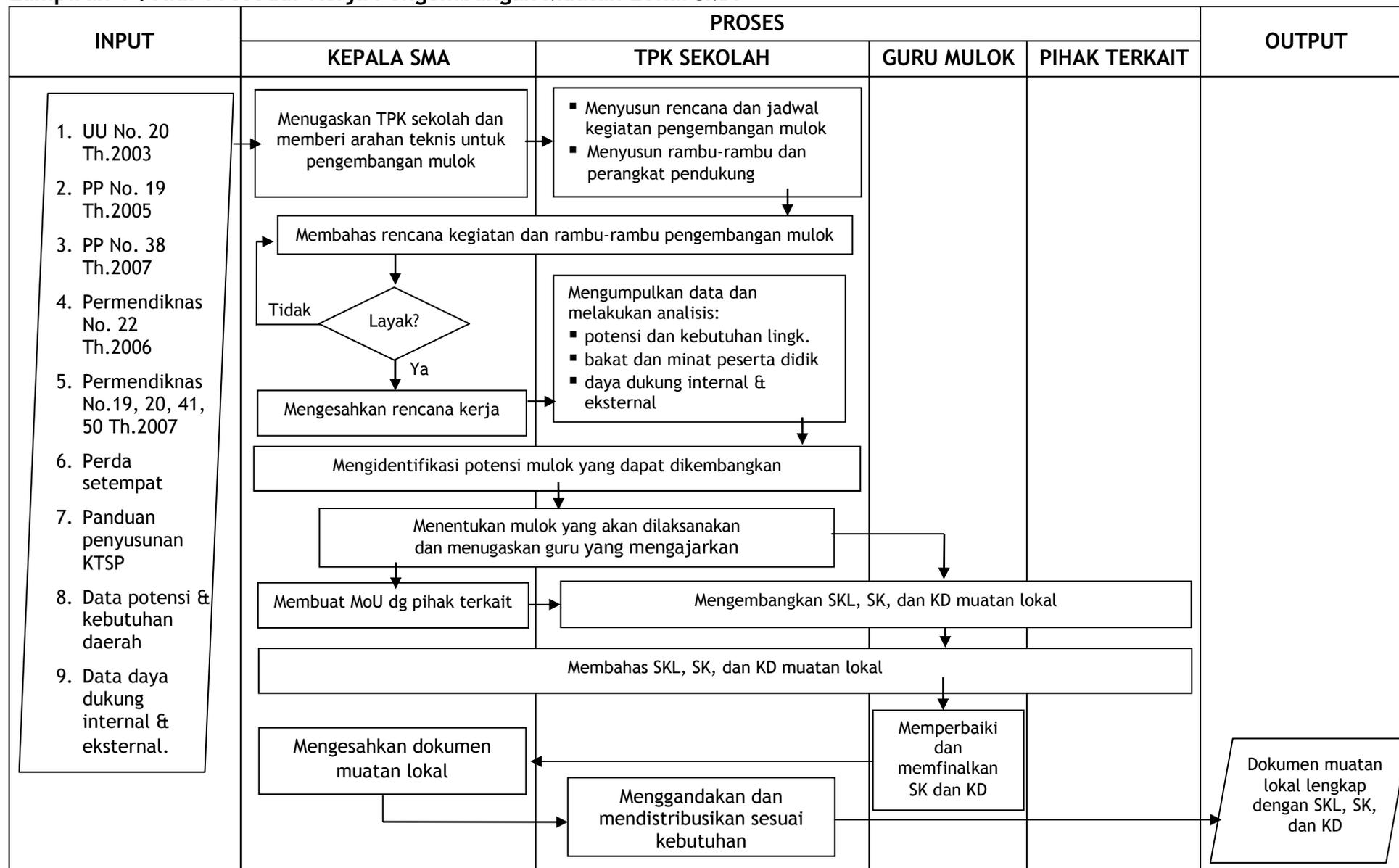
19. Dalam mengembangkan muatan lokal diperlukan data potensi kebutuhan daerah, potensi satuan pendidikan, serta dukungan internal dan eksternal;
20. Data potensi dan kebutuhan daerah dapat diperoleh dari instansi pemerintahan daerah setempat (kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota) dan atau dari internet;
21. Data potensi satuan pendidikan antara lain bakat dan minat peserta didik, keberadaan guru, dan sarana prasarana yang berhubungan dengan pengembangan muatan lokal;
22. Dukungan internal adalah dukungan warga sekolah (kepala sekolah, guru, petugas administrasi, dan peserta didik) terhadap pengembangan dan pelaksanaan muatan lokal;
23. Dukungan eksternal adalah dukungan masyarakat dan lingkungan di sekitar satuan pendidikan antara lain Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Dunia Industri/Dunia Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan, Lembaga Pendidikan Informal, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan dinas lain yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan muatan lokal;
24. Tim Pengembang Kurikulum sekolah yang selanjutnya disebut TPK Sekolah adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan kurikulum, terdiri atas wakil kepala sekolah, guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota (Panduan penyusunan KTSP dari BSNP, Bagian IV.B.1).

G. Uraian Prosedur Kerja

1. Kepala SMA menugaskan TPK sekolah untuk menyusun rencana kegiatan dan rambu-rambu pengembangan muatan lokal.
2. Kepala SMA memberi arahan teknis tentang pengembangan muatan lokal yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Dasar pelaksanaan pengembangan muatan lokal,
 - b. Tujuan dan manfaat pengembangan muatan lokal,
 - c. Hasil yang diharapkan dari pengembangan muatan lokal, dan
 - d. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan muatan lokal.
3. TPK sekolah menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan muatan lokal.
4. TPK sekolah menyusun rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal, yang meliputi:
 - a. Pengumpulan data potensi dan kebutuhan daerah, data potensi satuan pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal. Data ini digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. Penyusunan analisis potensi satuan pendidikan, termasuk identifikasi bakat dan minat peserta didik;
 - c. Penentuan jenis muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah;
 - d. Kerjasama dengan instansi terkait;

- e. Penyusunan SKL, SK, dan KD muatan lokal;
 - f. Pengesahan dokumen muatan lokal.
5. Kepala SMA bersama TPK sekolah membahas rencana dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal. Selanjutnya kepala sekolah mengesahkan rencana dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung tersebut;
 6. TPK sekolah mengumpulkan data dan melakukan analisis:
 - a. potensi dan kebutuhan daerah,
 - b. bakat dan minat peserta didik,
 - c. analisis potensi dan daya dukung satuan pendidikan internal dan eksternal.
(sesuai Bagian F butir 19 - 23);
 7. Kepala SMA bersama TPK sekolah mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan di sekolah berdasarkan hasil analisis. Kemudian menentukan jenis muatan lokal yang akan dilaksanakan sekolah;
 8. Kepala SMA memberi tugas kepada guru yang akan mengajar muatan lokal. Penugasan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi guru yang bersangkutan;
 9. Kepala SMA membuat kesepakatan kerja sama (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak-pihak yang terkait dengan jenis muatan lokal yang akan dilaksanakan, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), lembaga kursus keterampilan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dunia Usaha/Dunia Kerja, dan lain-lain.;
 10. TPK sekolah bersama guru muatan lokal dan pihak terkait mengembangkan SKL, SK, dan KD muatan lokal;
 11. Kepala SMA bersama TPK sekolah dan guru muatan lokal membahas SKL, SK, dan KD muatan lokal;
 12. Guru muatan lokal memperbaiki dan memfinalkan SKL, SK, dan KD;
 13. Kepala SMA mengesahkan dokumen muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SKL, SK, dan KD;
 14. TPK sekolah menggandakan dokumen muatan lokal dan mendistribusikan kepada guru muatan lokal dan pihak lain yang memerlukan.

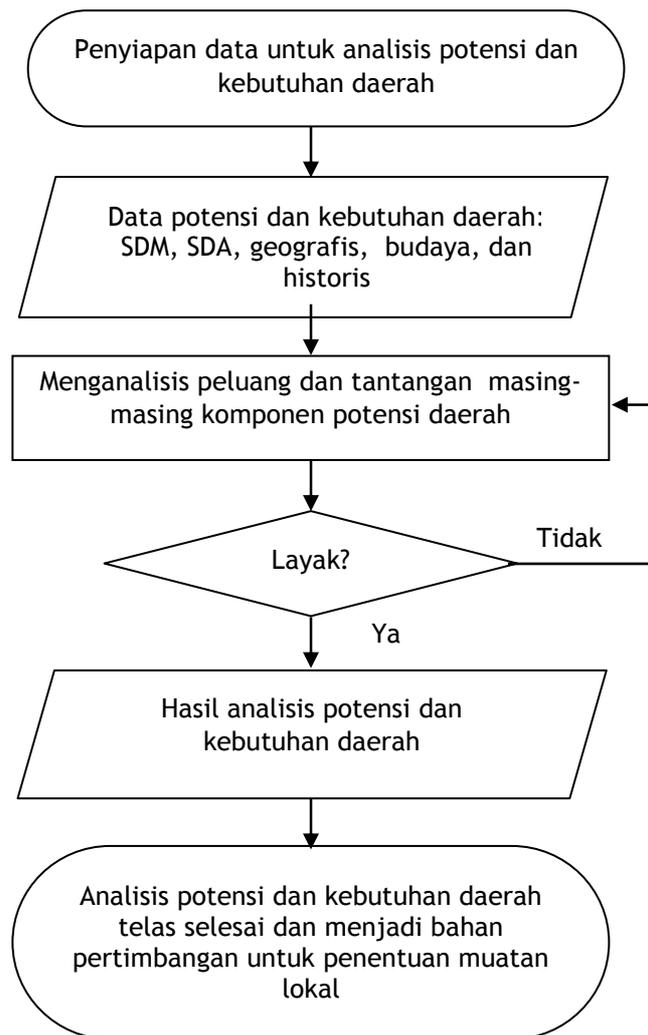
Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Pengembangan Muatan Lokal SMA



Lampiran 2 : Rambu-rambu Pengembangan Muatan Lokal

1. Membentuk tim kerja pengembang muatan lokal
2. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pengembangan muatan lokal
3. Membuat rambu-rambu dan instrumen/format yang akan digunakan
4. Mengumpulkan data dan informasi tentang potensi dan kebutuhan daerah, potensi satuan pendidikan, daya dukung internal dan eksternal
5. Membuat draf , membahas, dan memfinalkan hasil analisis potensi dan kebutuhan daerah
6. Membuat draf, membahas, dan memfinalkan hasil analisis potensi satuan pendidikan
7. Membuat draf, membahas, dan memfinalkan hasil analisis daya dukung internal
8. Membuat draf, membahas, dan memfinalkan hasil analisis daya dukung eksternal
9. Menentukan muatan lokal yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis
10. Menugaskan guru yang akan mengajar muatan lokal
11. Membuat kesepakatan kerja dengan instansi terkait
12. Mengembangkan SKL, SK, dan KD muatan lokal
13. Menandatangani dokumen muatan lokal lengkap dengan SKL, SK, dan KD
14. Menggandakan dan mendistribusikan dokumen muatan lokal

Lampiran 3 : Instruksi Kerja Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah



Penjelasan

1. Data potensi dan kebutuhan daerah dapat diperoleh dari Pemda setempat (desa/kelurahan, kecamatan, kab/ kota, provinsi) dan internet
2. Analisis potensi dan kebutuhan daerah dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan komponen-komponen potensi lingkungan/daerah yang meliputi SDM, SDA, geografis, budaya, dan historis
3. Kelayakan hasil analisis apabila:
 - a. peluang menunjukkan kondisi komponen lingkungan/daerah yang bersifat positif dan mendukung pendidikan di sekolah
 - b. tantangan/hambatan menggambarkan kondisi komponen lingkungan/daerah yang bersifat negatif dan kurang mendukung pendidikan di sekolah
 - c. Berdasarkan peluang dan tantangan/hambatan komponen lingkungan/daerah ditentukan beberapa alternatif potensi muatan lokal
4. Hasil analisis dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan muatan lokal yang akan dilaksanakan sekolah

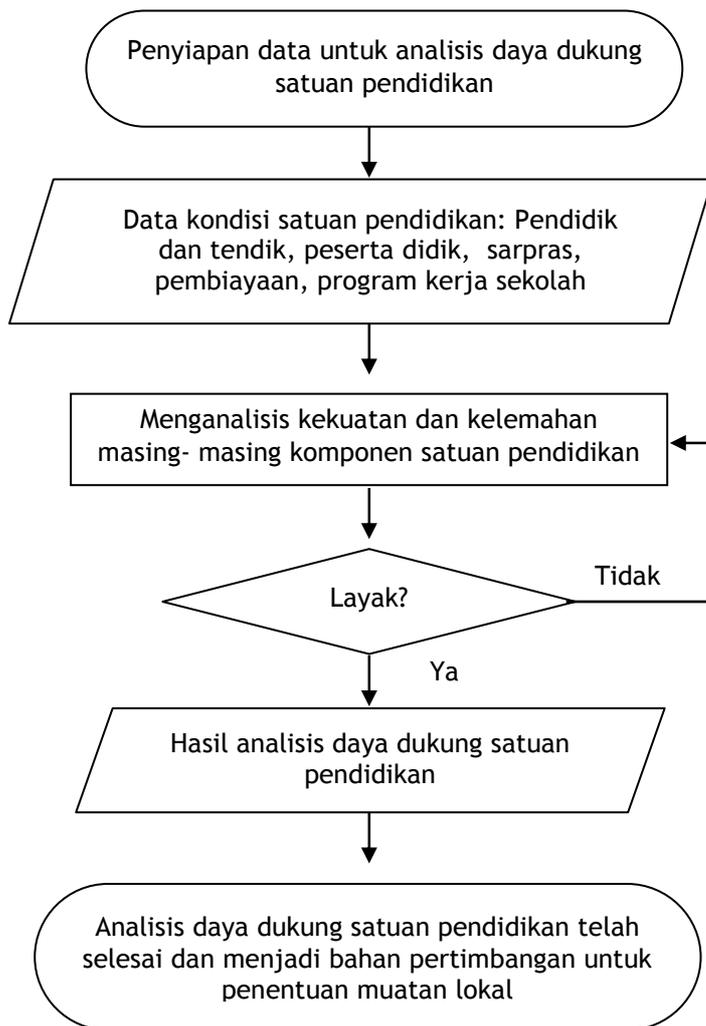
Lampiran 4 : Contoh Format Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah

	POTENSI DAERAH	PELUANG	TANTANGAN/HAMBATAN	POTENSI MULOK

Lampiran 5 : Contoh Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah

	POTENSI DAERAH	PELUANG	TANTANGAN/HAMBATAN	POTENSI MULOK
	Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan perkebunan luas, • Hasil perkebunan melimpah, • Terdapat taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil perkebunan belum dimanfaatkan secara optimal, • Objek wisata belum banyak pengunjung 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan lahan perkebunan • Pemasaran hasil perkebunan, • Kewirausahaan • Promosi pariwisata, • Pemandu wisata
	Sumber Daya Manusia	Masyarakat bersifat terbuka dan mau menerima inovasi di bidang iptek	Kurangnya motivator dan inovator yang terampil di bidang iptek	Peningkatan potensi peserta didik sebagai motivator dan inovator yang terampil di bidang iptek
	Lokasi Geografis	Lokasi ibukota kabupaten, berbagai dinas dan lembaga tidak terlalu jauh dari sekolah	Sekolah belum menjalin kemitraan dengan berbagai dinas terkait	Pemanfaatan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan mulok
	Budaya	Terdapat berbagai kesenian khas daerah	Kesenian daerah belum berkembang, karena kurang mendapat perhatian masyarakat	Pelestarian dan promosi kesenian daerah
	Historis	Terdapat berbagai macam peninggalan sejarah	Peninggalan sejarah belum banyak dikenal masyarakat	Promosi pariwisata; Pemandu wisata.

Lampiran 6 : Instruksi Kerja Analisis Daya Dukung Satuan Pendidikan (Internal)



Penjelasan

1. Data kondisi satuan pendidikan dapat diidentifikasi dari profil sekolah
2. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan komponen-komponen satuan pendidikan yang meliputi: pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan program-program sekolah
3. Kelayakan hasil analisis apabila:
 - a. kekuatan menunjukkan kondisi komponen satuan pendidikan yang mendukung mulok
 - b. kelemahan menggambarkan kondisi komponen satuan pendidikan yang kurang mendukung mulok
 - c. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan komponen satuan pendidikan dibuat rencana tindak lanjut
4. Hasil analisis dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan muatan lokal yang akan dilaksanakan sekolah

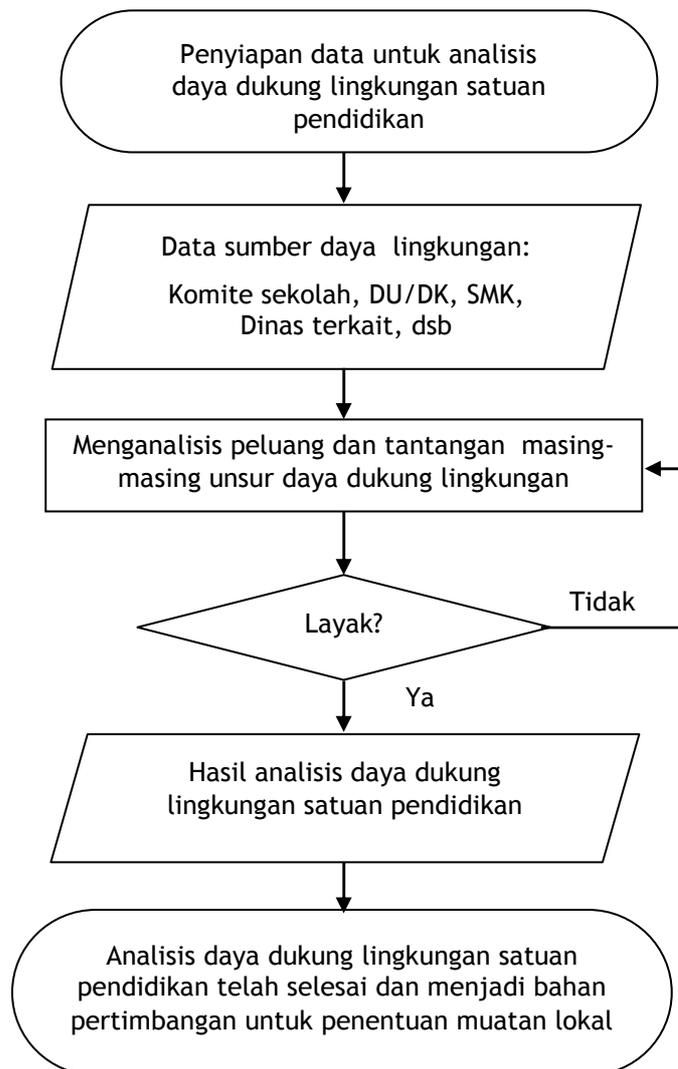
Lampiran 7 : Contoh Format Analisis Daya Dukung Satuan Pendidikan (Internal)

NO	KOMPONEN	KEKUATAN	KELEMAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT

Lampiran 8 : Contoh Hasil Analisis Daya Dukung Satuan Pendidikan (Internal)

NO	KOMPONEN	KEKUATAN	KELEMAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran dan motivasi belajar tinggi, • Mau menerima inovasi di bidang iptek, • Minat & bakat di bidang bhs Inggris, TIK, dan wirausaha tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ekonomi keluarga pada umumnya rendah • Lulusan yang melanjutkan pendidikan ke PT \pm 15% 	Sekolah berupaya membe-kali & mengembangkan potensi peserta didik melalui muatan lokal
2	Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Semua guru berkualifikasi S-1, • Mengajar sesuai latar belakang pendidikan • Ada guru yang memiliki keterampilan berwirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terfungsikannya guru yang memiliki potensi di luar kompetensi mata pelajaran 	Mendayagunakan guru yang memiliki potensi sesuai muatan lokal yang akan dikembangkan sekolah
3	Sarana Prasarana	Kondisi dan kelengkapan ruang laboratorium IPA, komputer dan bahasa memadai	Kurangnya buku-buku referensi di perpustakaan sekolah	Sekolah berupaya menyediakan layanan peminjaman dengan perpustakaan sekolah lain/ lembaga lain

Lampiran 9 : Instruksi Kerja Analisis Daya Dukung Lingkungan Satuan Pendidikan (Eksternal)



Penjelasan

1. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan komponen-komponen sumber daya lingkungan satuan pendidikan yang meliputi: komite sekolah, Dunia Usaha/Dunia Kerja, SMK, Dinas terkait, dsb
2. Kelayakan hasil analisis apabila:
 - a. kekuatan menunjukkan kondisi komponen sumber daya lingkungan satuan pendidikan yang mendukung mulok
 - b. kelemahan menggambarkan kondisi komponen sumber daya lingkungan satuan pendidikan yang kurang mendukung mulok
 - c. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan komponen sumber daya lingkungan satuan pendidikan dibuat rencana tindak lanjut
3. Hasil analisis dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan muatan lokal yang akan dilaksanakan sekolah

Lampiran 10 : Contoh Format Analisis Daya Dukung Lingkungan Satuan Pendidikan (Eksternal)

NO	KOMPONEN	PELUANG	TANTANGAN	RENCANA TINDAK LANJUT

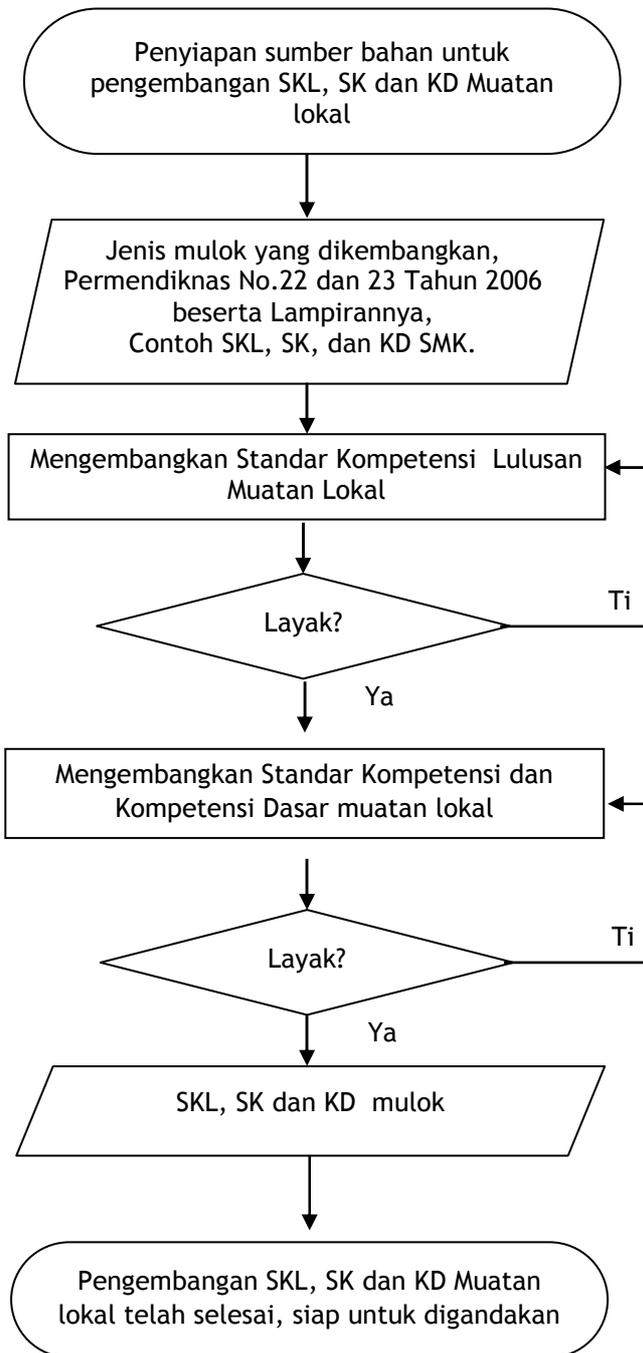
Lampiran 11 : Contoh Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Satuan Pendidikan (Eksternal)

NO	KOMPONEN	PELUANG	TANTANGAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Komite sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Komite sekolah memiliki potensi sebagai nara sumber dalam peningkatan mutu sekolah Komite punya potensi membantu sekolah dalam pemenuhan sarpras yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> Nara sumber dari unsur Komite Sekolah yang ada, belum berperan sebagai-mana mestinya Adanya peraturan daerah tentang pendidikan gratis 	<ul style="list-style-type: none"> Mengundang unsur Komite Sekolah yang berpotensi sebagai nara sumber dalam peningkatan mutu sekolah Mengajukan rencana pengadaan/ pemenuhan sarana dan prasarana kepada komite sekolah untuk ditindaklanjuti
2.	Dunia Usaha/Dunia Kerja (DU/DK)	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan DU/DK di sekitar sekolah cukup banyak DU/DK memiliki potensi mendukung sekolah di bidang kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kepedulian DU/DK untuk mendukung program-program sekolah masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan kerjasama dengan DU/DK untuk pengembangan mulok.
3.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	<ul style="list-style-type: none"> SMK memiliki SKL, SK, dan KD kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada kerjasama dengan SMK 	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin kerjasama dengan SMK dalam pengembangan mulok

Lampiran 12 : Contoh Penentuan Muatan Lokal Yang Akan Dilaksanakan Di Sekolah

POTENSI DAERAH	POTENSI MULOK	DAYA DUKUNG	MULOK YANG AKAN DILAKSANAKAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan perkebunan luas, ▪ Hasil perkebunan melimpah, ▪ Terdapat taman wisata alam ▪ Terdapat berbagai peninggalan sejarah ▪ Kesenian khas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wirausaha ▪ Agrobisnis ▪ Pengolahan hasil perkebunan, ▪ Pemasaran hasil perkebunan ▪ Promosi wisata, ▪ Pemandu wisata ▪ Kesenian daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi dan kelengkapan laboratorium bahasa dan laboratorium komputer memadai ▪ Peserta didik memiliki bakat dan minat di bidang bhs. Inggris, TIK, dan wirausaha ▪ Ada guru yang memiliki keterampilan berwirausaha ▪ Peluang menjalin kerjasama dengan DU/DK, SMK, dan dinas perdagangan 	<p>Kewirausahaan</p>

Lampiran 13 : Instruksi Kerja Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi, dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal.



Penjelasan

1. Kelayakan Standar Kompetensi Lulusan muatan lokal apabila meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dikuasai peserta didik setelah mengikuti seluruh pembelajaran muatan lokal di SMA.
2. Kelayakan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar muatan lokal apabila mengacu pada SKL mulok dan sistematika pengembangannya mengikuti SK dan KD mata pelajaran lain, yaitu terdiri atas Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, SK-KD, dan Arah Pengembangan, dengan substansi yang logis dan dapat dilaksanakan.

Lampiran 14 : Contoh Standar Kompetensi Lulusan Muatan Lokal

(Adaptasi SKL SMK)

NAMA SEKOLAH: SMA MANDIRI - JAKARTA

MUATAN LOKAL KEWIRAUSAHAAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Mengidentifikasi kegiatan dan peluang usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.
2. Menerapkan sikap dan perilaku wirausaha dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakatnya.
3. Memahami sendi-sendi kepemimpinan dalam berwirausaha.
4. Menerapkan sendi-sendi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Menerapkan perilaku kerja prestatif dalam kehidupannya.
6. Merencanakan usaha kecil/mikro dalam bidangnya.
7. Mengelola usaha kecil/mikro dalam bidangnya.

Lampiran 15 : Contoh Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Muatan Lokal

(Adaptasi SK dan KD SMK)

NAMA SEKOLAH: SMA MANDIRI - JAKARTA

MUATAN LOKAL KEWIRAUSAHAAN

1. Latar Belakang

Jakarta merupakan kota internasional, kota perdagangan, kota jasa, dan kota pariwisata, yang mau tidak mau harus siap menghadapi era globalisasi yang nyaris tiada batas antarnegara, apalagi persaingan di berbagai bidang sangat tajam, terutama di bidang ekonomi. Agar dapat bertahan hidup dan bersaing di lingkungan kota metropolitan Jakarta, peserta didik SMA perlu dibekali dengan jiwa, semangat, dan keterampilan berwirausaha. Dengan mempertimbangkan hasil analisis potensi dan kebutuhan DKI Jakarta, analisis minat dan bakat peserta didik, analisis daya dukung baik internal maupun eksternal, ditetapkan **Kewirausahaan** sebagai pilihan tepat untuk dikembangkan sebagai muatan lokal di SMA Mandiri Jakarta.

Pengembangan kemampuan dan keterampilan berwirausaha, bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup, yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi untuk bertahan hidup, serta mampu menyesuaikan diri agar berhasil dalam kehidupan bermasyarakat. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) muatan lokal Kewirausahaan dikembangkan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan berfungsi sebagai acuan pengembangan silabus yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik sekolah. SKL, SK, dan KD muatan lokal kewirausahaan untuk SMA Mandiri Jakarta dikembangkan bersama oleh tim kerja pengembang muatan lokal, guru muatan lokal, dan SMK Pembina Jakarta.

Muatan lokal Kewirausahaan dimaksudkan agar peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku wirausaha. Isi muatan lokal Kewirausahaan difokuskan pada perilaku wirausaha sebagai fenomena empiris yang terjadi di lingkungan peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik dituntut untuk lebih aktif mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran muatan lokal kewirausahaan dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa kepemimpinan, yang sangat terkait dengan cara mengelola usaha untuk membekali peserta didik agar dapat berusaha secara mandiri.

2. Tujuan

Muatan lokal Kewirausahaan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Memahami dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitarnya
- b. Berwirausaha dalam bidangnya
- c. Menerapkan perilaku kerja prestatif dalam kehidupannya
- d. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran muatan lokal Kewirausahaan di SMA Mandiri meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Sikap dan perilaku wirausaha
- b. Kepemimpinan dan perilaku prestatif
- c. Solusi masalah
- d. Pembuatan keputusan

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha	1.1 Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausahawan 1.2 Menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif 1.3 Merumuskan solusi masalah 1.4 Mengembangkan semangat wirausaha 1.5 Membangun komitmen bagi dirinya dan bagi orang lain 1.6 Mengambil resiko usaha 1.7 Membuat keputusan
2. Menerapkan jiwa kepemimpinan	2.1 Menunjukkan sikap pantang menyerah dan ulet 2.2 Mengelola konflik 2.3 Membangun visi dan misi usaha
3. Merencanakan usaha kecil/mikro	3.1 Menganalisis peluang usaha 3.2 Menganalisis aspek-aspek pengelolaan usaha 3.3 Menyusun proposal usaha
4. Mengelola usaha kecil/mikro	4.1 Mempersiapkan pendirian usaha 4.2 Menghitung resiko menjalankan usaha 4.3 Menjalankan usaha kecil 4.4 Mengevaluasi hasil usaha

5. Arah Pengembangan

Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.